

**Efektivitas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas  
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan  
Kota Langsa**

**<sup>1</sup>Thirarisani, <sup>2</sup>Harmona Daulay, <sup>3</sup>Faizal Madya**  
<sup>1,2,3</sup> Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka  
risani.thira@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research aims to describe the effectiveness of the Integrity Zone (IZ) development towards Corruption-Free Zone and Clean Bureaucratic Service Area in Kantor Pertanahan Kota Langsa, as well as to identify the dimensions that influencing the effectiveness of IZ development towards Corruption-Free Zone and Clean Bureaucratic Service Area in the Kantor Pertanahan Kota Langsa. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection is conducted through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that (1) In terms of program success criteria, the results show the effectiveness of IZ development towards Corruption-Free Zone and Clean Bureaucratic Service Area in the Kantor Pertanahan Kota Langsa. (2) The research findings related to target achievement criteria demonstrate that the Kantor Pertanahan Kota Langsa has effectively implemented the IZ development towards Corruption-Free Zone and Clean Bureaucratic Service Area. (3) Concerning program satisfaction criteria, this research shows that the IZ development towards Corruption-Free Zone and Clean Bureaucratic Service Area in the Kantor Pertanahan Kota Langsa has been carried out effectively. And (4) The research findings indicate the presence of internal and external factors influencing the IZ development towards Corruption-Free Zone and Clean Bureaucratic Service Area in the Kantor Pertanahan Kota Langsa.*

**Keywords:** *Effectiveness, Integrity Zone*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan Kota Langsa, juga untuk mengetahui dimensi yang mempengaruhi efektivitas pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada kriteria keberhasilan program, hasil penelitian menunjukkan efektivitas pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan Kota Langsa. (2) Hasil penelitian pada kriteria keberhasilan sasaran menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Langsa telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan efektif. (3) Pada kriteria kepuasan terhadap program, penelitian ini menunjukkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan Kota Langsa telah berjalan dengan efektif. Dan (4) Hasil penelitian menunjukkan ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi

pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan Kota Langa.

**Kata kunci:** Efektivitas, Zona Integritas

## PENDAHULUAN

Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah strategi pemerintah dalam mereformasi birokrasi dengan lebih cepat dan efisien. Zona Integritas merupakan upaya awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan. Konsep "bersih" merujuk pada eliminasi praktik KKN, sementara "melayani" mengacu pada peningkatan mutu layanan publik. Pembangunan ZI diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan pedoman untuk membangun ZI di unit kerja. Awalnya diatur oleh Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014, pedoman ini diperbaharui menjadi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, dan kemudian menjadi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021. Pada tingkat instansi seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), beberapa unit kerja seperti Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kota Medan, dan Kota Langsa telah berhasil meraih predikat WBK dan WBBM. Kantor Pertanahan Kota Langsa meraih predikat WBK pada tahun 2018.

Meskipun Kantor Pertanahan Kota Langsa memiliki peran penting dalam menangani masalah pertanahan yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang, pelayanan di bidang ini sering kali menuai keluhan. Permasalahan birokrasi seperti pelayanan yang kompleks, lambat, mahal, serta adanya praktik KKN masih berlanjut. Di era reformasi birokrasi, administrasi pertanahan masih terikat pada prosedur birokratis yang memakan waktu.

Sepanjang tahun 2021 lalu Ombudsman Republik Indonesia menerima 1.612 laporan terkait agraria atau pertanahan (Subarkah, 2021). Laporan mengenai layanan pertanahan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan substansi lain. Ribuan laporan tersebut antara lain terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tumpang tindih kepemilikan, proses pengadaan tanah, sengketa konflik perkebunan, pendaftaran tanah, pengukuran ulang, juga pengembalian batas. Dengan predikat WBK yang disandangnya, Kantor Pertanahan Kota Langsa tak lepas dari keluhan masyarakat. Beberapa keluhan yang dimuat di media massa antara lain:

- a) Dugaan pungutan liar di Kantor Pertanahan Kota Langsa sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmat sebagaimana dimuat di portal berita *online* [www.metrorakyat.com](http://www.metrorakyat.com) pada 25 Mei 2021

- b) Dugaan praktik mafia tanah di Kantor Pertanahan Kota Langsa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh sebagaimana yang dimuat dalam portal berita *online* [www.metrorakyat.com](http://www.metrorakyat.com) pada 03 Juni 2021
- c) Dugaan diterbitkannya sertifikat ganda oleh Kantor Pertanahan Kota Langsa yang disampaikan oleh Lawfirm Aceh Legal Consult yang dimuat dalam portal berita *online* [www.acehtrend.com](http://www.acehtrend.com) pada 21 Juni 2021
- d) Kantor Pertanahan Kota Langsa dianggap mempersulit masyarakat yang ingin memperoleh salinan dokumen bukti kepemilikan tanah yang dilaporkan oleh Ramli, A.B sebagaimana dimuat di portal berita *online* [www.metrorakyat.com](http://www.metrorakyat.com) pada 14 Maret 2022

Berbagai keluhan dari masyarakat tetap datang ketika unit kerja ini telah dengan lantang menyuarakan reformasi birokrasi melalui pembangunan ZI. Melihat kenyataan yang terjadi maka muncul pertanyaan: 'Apakah pembangunan ZI sudah efektif di Kantor Pertanahan Kota Langsa?'

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa serta dimensi apa saja yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Untuk menggambarkan efektivitas pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa digunakan Teori Efektivitas Campbell. Menurut Campbell (1989: 121), terdapat 5 (lima) indikator penilaian efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Penelitian ini hanya menggunakan 3 dari 5 kriteria tersebut yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, dan kepuasan terhadap program dengan alasan untuk mencegah redundansi, adanya keterbatasan sumber daya, juga sebagai upaya untuk fokus pada aspek ini yang ingin diteliti.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu kombinasi antara pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif. Penelitian ini memilih lokasi di Kantor Pertanahan Kota Langsa. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena Kantor Pertanahan Kota Langsa termasuk unit kerja pertama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang meraih predikat WBK pada tahun 2018

Proses pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yang mengarah pada pemilihan individu yang memiliki pengetahuan mendalam atau otoritas terkait pembangunan Zona Integritas. Sumber informasi diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jajaran Kantor Pertanahan Kota Langsa dan masyarakat yang menerima layanan dari Kantor Pertanahan Kota Langsa.

Metode pengumpulan data terdiri dari observasi langsung terhadap aktivitas di Kantor Pertanahan Kota Langsa, wawancara dengan informan yang terpilih, serta dokumentasi terkait program dan implementasinya.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data untuk mengidentifikasi pola-pola utama, *display* data untuk menggambarkan temuan secara visual, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Validitas dan kredibilitas data dipastikan melalui triangulasi data, yang mencakup penggunaan berbagai sumber dan metode untuk mengonfirmasi hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Pembangunan Zona Integritas**

Untuk menggambarkan efektivitas pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa peneliti menggunakan 3 kriteria dari teori efektivitas Campbell. Kriteria pertama yaitu keberhasilan program. Dari wawancara diketahui bahwa pembangunan ZI merupakan komitmen berkelanjutan di Kantor Pertanahan Kota Langsa dengan terus menerus dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan, perbaikan dan penataan sarana dan prasarana, dengan tujuan yang lebih tinggi yaitu WBBM. Mengenai proses pembangunan ZI, diperoleh informasi bahwa pembangunan ZI diawali dengan pencaangan dan identifikasi komponen pengungkit, dilanjutkan dengan perbaikan sarana prasarana, penyusunan tim kerja, sosialisasi dan publikasi serta evaluasi dan pemenuhan eviden yang diprasyaratkan. Dalam hal pelaksanaan instruksi dari kementerian ATR/BPN, dari para informan diperoleh informasi bahwa Kantor Pertanahan Kota Langsa mematuhi instruksi yang telah diberikan meskipun ada beberapa kendala yang ditemukan dan berhasil diatasi, juga adanya tantangan baik internal maupun eksternal. Instruksi dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PAN/RB dijadikan panduan pelaksanaan pembangunan ZI. Mengenai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, para informan menyampaikan bahwa tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan mendukung keberhasilan pembangunan ZI, menjadi landasan yang kuat dan sebagai pendorong bagi perubahan yang positif. Terkait upaya-upaya yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa Kantor Pertanahan Kota Langsa telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan sarana dan prasarana, memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai pencegahan korupsi dan standarisasi pelayanan, juga melakukan evaluasi secara berkala. Diketahui pula bahwa ada kelompok kerja yang jelas yang berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala Kantor, terdapat keterkaitan antara tugas dengan kompetensi pegawai serta fokus pada perubahan yang dihasilkan serta dilakukan evaluasi secara berkala.

Keberhasilan Kantor Pertanahan Kota Langsa dalam membangun ZI dapat dikaitkan dengan kriteria keberhasilan program dalam Teori Efektivitas Campbell. Campbell (1989: 121) menyatakan bahwa untuk mencapai efektivitas program, penting untuk memiliki kemampuan operasional yang memadai dalam menjalankan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat dinilai melalui evaluasi terhadap proses dan mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berdasarkan

kriteria keberhasilan program tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kota Langsa memenuhi kriteria efektivitas dalam Teori Efektivitas Campbell. Program ini mencapai tujuan yang ditetapkan, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, serta dilaksanakan dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Kriteria kedua adalah keberhasilan sasaran. Dari informan diperoleh informasi bahwa sasaran pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa adalah fokus pada peningkatan pelayanan, pencegahan korupsi dan transparansi layanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta birokrasi yang bersih dan efisien. Sedangkan subjek pembangunan ZI adalah pegawai dan masyarakat, para *stakeholder* serta masyarakat pengguna layanan. Mengenai keberhasilan mencapai sasaran, diperoleh informasi bahwa Kantor Pertanahan Kota Langsa telah berhasil meraih predikat WBK, berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan indeks persepsi anti korupsi.

Efektivitas pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa dapat dideskripsikan dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan Kantor Pertanahan Kota Langsa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam teori efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell, konsep efektivitas dapat didefinisikan melalui sejauh mana pencapaian *output* yang dihasilkan melalui implementasi kebijakan dan prosedur oleh suatu organisasi, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun Kantor Pertanahan belum berhasil meraih predikat WBBM, namun dapat dikatakan bahwa pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa telah efektif.

Kriteria yang terakhir adalah kepuasan terhadap program. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kepuasan yang dirasakan terhadap program pembangunan ZI, peneliti menggali 2 informasi dari para informan, yang pertama mengenai kepuasan yang dirasakan masyarakat. Informasi yang diperoleh berupa data Survei Kepuasan Masyarakat yang bernilai 'BAIK', adanya peningkatan pelayanan mandiri yang artinya penggunaan calo/perantara berkurang, serta adanya testimoni positif dari masyarakat. Informasi kedua yang ingin digali adalah adanya peningkatan kualitas layanan setelah pembangunan ZI. Informan menyatakan bahwa nilai Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan peningkatan. Kantor Pertanahan Kota Langsa juga melakukan renovasi ruangan loket dan perbaikan infrastruktur agar kepuasan masyarakat meningkat. Juga adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran dan meningkatkan kecakapan petugas. Untuk kriteria kepuasan terhadap program ini peneliti juga menggali informasi dari masyarakat penerima layanan di Kantor Pertanahan Kota Langsa. Mayoritas informan menganggap ZI sebagai sebuah program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, beberapa dari mereka kurang mengetahui tentang program ini. Sosialisasi ZI terutama dilakukan melalui spanduk, *banner*, dan media sosial seperti Instagram. Ada juga yang merasa kurang diinformasikan, hanya melihat spanduk dan poster. Mayoritas informan merasakan perubahan positif setelah implementasi ZI, terutama terkait kenyamanan, kebersihan, dan efisiensi layanan di Kantor

Pertanahan Kota Langsa. Meski begitu, beberapa informan belum merasakan perubahan karena belum pernah mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Langsa sebelumnya. Dalam hal kualitas pelayanan, mayoritas informan merasakan peningkatan dalam penjelasan biaya, waktu, dan persyaratan layanan. Beberapa di antaranya menyebut pelayanan lebih baik, ramah, transparan, dan prosesnya lebih cepat serta tidak rumit. Beberapa informan yang baru pertama kali datang berharap pelayanan semakin membaik dengan adanya pembangunan ZI. Terkait pungutan liar dan gratifikasi, mayoritas informan menyatakan tidak ada praktik pungutan liar atau gratifikasi, dan biaya yang dikenakan sesuai dengan kuitansi yang mereka terima. Beberapa di antaranya menyebut tidak ada pungutan di loket, dan biaya layanan sesuai peraturan yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak memberikan uang "terima kasih" kepada petugas. Secara keseluruhan, mayoritas informan memiliki pemahaman positif terhadap ZI sebagai upaya pencegahan korupsi. Sosialisasi ZI melalui spanduk, *banner*, dan media sosial memberikan dampak, meskipun beberapa informan merasa kurang diinformasikan. Adanya perubahan positif terutama terkait kualitas pelayanan dan penghapusan praktik pungutan liar menunjukkan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kota Langsa dalam menerapkan ZI.

Dalam teori efektivitas Campbell, kepuasan dianggap sebagai kriteria utama untuk mengukur kesuksesan program, merujuk pada kemampuan program untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Kepuasan ini tercermin dalam persepsi para pengguna terhadap kualitas produk atau layanan yang disediakan. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa sesuai dengan kriteria kepuasan program dari teori tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa telah berhasil menjadi efektif.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya mengenai pelaksanaan pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa, dapat dikatakan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Kantor Pertanahan Kota Langsa dapat dikategorikan efektif. Beberapa hal yang mendukung pernyataan ini adalah:

- a) Kantor Pertanahan Kota Langsa telah meraih predikat WBK pada tahun 2018, menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan prinsip ZI dan upaya pencegahan korupsi.
- b) Upaya perbaikan terus dilakukan dalam berbagai aspek, termasuk renovasi ruangan loket pelayanan, pelatihan pelayanan prima bagi petugas loket, sosialisasi anti-korupsi bagi pegawai, peningkatan penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
- c) Masyarakat penerima layanan memberikan tingkat kepuasan yang baik dalam survei yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Langsa, mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan telah meningkat setelah pembangunan ZI.

Meskipun terdapat keluhan dari masyarakat terkait pelayanan pertanahan yang diberikan, nyatanya pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa telah dinilai efektif berdasarkan Teori Efektivitas Campbell. Kriteria efektivitas Campbell meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, dan kepuasan terhadap program. Kendati telah terjadi perubahan positif dalam tata kelola dan pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Langsa berkat pembangunan ZI, beberapa masyarakat masih mengalami ketidakpuasan karena alasan-alasan tertentu. Keluhan ini bisa akibat perbedaan harapan masyarakat dengan realitas yang ada, kurangnya informasi yang tersedia, atau juga terkait dengan aspek-aspek tertentu yang belum optimal dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk terus melakukan evaluasi, berkomunikasi dengan masyarakat, dan memperbaiki aspek-aspek yang masih menimbulkan keluhan agar tujuan dari pembangunan ZI dapat lebih efektif tercapai sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

## **2. Dimensi Yang Mempengaruhi Efektivitas Pembangunan Zona Integritas**

Pada setiap pelaksanaan program, tidak dapat dihindari bahwa berbagai dimensi akan memainkan peran penting dalam menentukan efektivitasnya. Dalam konteks pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa, terdapat beberapa dimensi yang mempengaruhi efektivitasnya. Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diperoleh dimensi internal yang mempengaruhi yaitu komitmen pimpinan, sistem manajemen internal, budaya organisasi, pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pengawasan internal dan eksternal.

Dimensi eksternal yang mempengaruhi pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa adalah dimensi yang berasal dari luar organisasi. Dimensi eksternal memainkan peran penting dalam mempengaruhi pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Langsa. Beberapa dimensi eksternal yang dapat mempengaruhi pembangunan ZI berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi yang telah dilakukan adalah peraturan dan kebijakan pemerintah, keterlibatan masyarakat, peran media, kolaborasi dengan instansi terkait, teknologi dan inovasi

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kota Langsa berhasil meraih predikat WBK, mencapai sasaran pembangunan ZI seperti peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan. Efektivitas juga tercermin dalam tingkat kepuasan masyarakat dan testimoni positif. Dimensi internal (komitmen pimpinan, sistem manajemen, budaya organisasi, pengembangan SDM) dan dimensi eksternal (peraturan pemerintah, partisipasi masyarakat, peran media, kolaborasi instansi terkait, teknologi) berperan dalam keberhasilan pembangunan ZI.

Kantor Pertanahan Kota Langsa perlu meningkatkan layanan dan memenuhi komponen penilaian ZI guna meraih predikat WBBM. Harapannya, kendala yang menghambat pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dapat diatasi. Kantor Pertanahan Kota Langsa perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi ZI kepada pegawai dan masyarakat. Pendekatan terintegrasi antara dimensi internal dan eksternal penting agar memperkuat komitmen pimpinan, mempromosikan budaya transparan, mengembangkan SDM fokus integritas, serta memperkuat keterlibatan masyarakat, media, kolaborasi, dan teknologi guna efektivitas pembangunan Zona Integritas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Alex Minta Penegak Hukum Berantas Mafia Tanah Diduga Bersarang di kantor BPN Langsa. Diunduh 05 Juli 2022, dari World Wide Web: <https://www.metrorakyat.com>
- Annur, C.M. (2021). Persyaratan Berbelit, Keluhan Utama Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik. Diunduh 14 April 2022, dari situs World Wide Web: <https://databoks.katadata.co.id>
- BPN, Pelayanan Publik Terburuk. Diunduh 15 April 2022, dari situs World Wide Web: <https://mediakasasi.com/>
- Campbell. J. P. (1989). Riset dalam Efektivitas Organisasi. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Erlangga.
- Diduga Keluarkan Surat Ganda, Kuasa Hukum Gugat Kepala Kantor Pertanahan Langsa, Diunduh 05 Juli 2022, dari World Wide Web: <https://acehtrend.com>
- Kasus Tanah HGB Rahmat WNA Sudah Bayar Banyak Ke BPN Langsa, Diunduh 05 Juli 2022, dari World Wide Web: <https://metrorakyat.com>
- Lapor Pak Presiden! Ini Kepala BPN Langsa Diduga Persulit Warga, Kanwil BPN Aceh Jangan Tutup Mata. Diunduh 05 Juli 2022, dari World Wide Web: <https://www.metrorakyat.com>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
- Subarkah, T. (2021). Ombudsman Terima 1.612 Laporan Terkait Pertanahan Selama 2021. Diunduh 21 April 2022, dari situs World Wide Web: <https://mediaindonesia.com/>